

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KEANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN
PELAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
(Studi pada Aparat Pemerintah di Seluruh Dinas Kabupaten Bungo)**

Rama Dhonal¹⁾, Sri Rahayu²⁾, Yudi³⁾

¹⁾*Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2017*

^{2&3)}*Dosen Pembimbing*

ABSTRACT

This study analyzed the influence of Internal Control Accounting, Utilization of Information Technology, and Quality of Human Resources on the Reliability and Timeliness of Financial Report at Bungo District Government. This research was a research survey used questionnaire data. The population in this study was the head and staff sub-section finance in Bungo Regency. The sampling technique used a saturated sample. Data analysis technique used Descriptive Analysis and Partial Least Square Analysis.

The result of these analysis shows that the quality of human resources didn't affect the reliability, but the internal control of accounting and utilization of information technology affected by the reliability of financial report. The utilization of information technology didn't affect to timeline of financial report, while the internal control of accounting and quality of human resources affect the timeline of financial report. The quality of human resources didn't affect to reliability due to the lack of staff or employees with background accounting and the level of education still relatively low due to the presence of employees who have high school education background in Bungo District. The utilization of information technology hasn't effect on the timeline of financial report due to the computerized system. These happened caused of the computerized system which was old and rather error frequenl. Beside of these, there wasn't a professinal staff or employees who handle it could be obstruc the work. So, the time required to prepare a proper financial report will be longer than regularly.

Keywords: Internal control of accounting, utilization of information technology, quality of human resources, the reliability of financial reporting and the timeliness of financial reporting

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Bungo. Penelitian ini merupakan *survey research* dan menggunakan data kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala dan staf sub bagian keuangan di dinas Kabupaten Bungo. Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan sampel jenuh (*sensus*). Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan Analisis Deskriptif dan Analisis *Partial Least Square* (PLS).

Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas SDM tidak berpengaruh terhadap keterandalan, namun pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan, sementara pengendalian intern akuntansi dan kualitas SDM berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan. Kualitas SDM tidak berpengaruh terhadap keandalan disebabkan karena minimnya staff atau pegawai yang berlatar belakang akuntansi dan taraf pendidikan yang masih relatif rendah dikarenakan masih adanya pegawai yang berlatar pendidikan SMA di dinas Kabupaten Bungo. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan disebabkan karena sistem komputerisasi yang digunakan telah berumur dan sering terjadinya *error* serta tidak adanya staf atau pegawai khusus yang menangani hal tersebut sehingga dapat menghambat pekerjaan yang mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan suatu pelaporan keuangan yang tepatwaktu akan semakin lama.

Kata Kunci: Pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, keandalan dan ketepatanwaktu pelaporan keuangan.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Halim dkk, 2010). Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Siregar, 2015).

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai akan manfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan karakteristik kualitatif laporan keuangan itu adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah pertama adalah keandalan merupakan unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Keandalan merupakan kemampuan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Jika sesuatu informasi sudah dinyatakan benar atau valid maka informasi tersebut layak menjadi acuan dalam pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan.

Karakteristik kedua adalah ketepatan waktu penyajian laporan keuangan berbanding lurus dengan relevansi laporan keuangan. Jadi, semakin lama suatu organisasi pemerintahan menerbitkan laporan keuangannya semakin tidak relevan laporan keuangannya. Sehingga manfaat dari laporan keuangan itu akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia pada waktunya. Ketepatan waktu publikasi laporan keuangan merupakan salah satu elemen pokok yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi nilai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut, bahkan manfaatnya sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan juga dapat berkurang. Keterandalan dan ketepatan waktu merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak, (Winidyaningrum dkk, 2010).

Pengendalian intern akuntansi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah, hal ini dapat dilihat dari definisi pengendalian intern menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Dari definisi tersebut diungkapkan bahwa pengendalian intern yang baik akan tercermin dalam keandalan laporan keuangan pemerintah.

Fenomena yang menggambarkan bahwa pelaporan keuangan daerah masih belum maksimal salah satunya yaitu di Kabupaten Bungo yang dilihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah secara umum menunjukkan belum tertibnya pelaporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Bungo yang disebabkan oleh beberapa faktor. Sementara untuk pemerintah daerah kabupaten Bungo yang masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian pada tahun 2013 dikarenakan pencatatan aset yang tidak sesuai dengan realisasi, dimana aset yang sudah tidak terpakai lagi tetap dimasukkan dalam laporan keuangan, sehingga terjadi ketidakseimbangan pada neraca (Hasil pemeriksaan BPK provinsi Jambi, 2015). Berikut opini atas laporan keuangan kabupaten Bungo dari tahun 2009- 2013

Tabel. 1
Opini Audit Kabupaten Bungo
Periode 2009-2013

Tahun	Jenis Opini
2009	Wajar dengan Pengecualian
2010	Wajar dengan Pengecualian
2011	Wajar dengan Pengecualian
2012	Wajar dengan Pengecualian
2013	Wajar dengan Pengecualian

(Sumber: IHPS II 2014)

Faktor pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ditemukan kasus kelemahan sistem pengendalian intern akuntansi dan pelaporan pada pemerintahan daerah di seluruh Indonesia sebanyak 1829 kasus dan 1346 kasus terjadi pada seluruh kabupaten di Indonesia (IHPS I 2014). Tujuh kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi tersebut terjadi di pemerintah Kabupaten Bungo. Berikut tabel daftar kelompok temuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 terkait kasus kelemahan sistem pengendalian intern:

Tabel 1.2
Temuan BPK Terkait Kasus Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Entitas	Kelemahan sistem pengendalian intern			
	Jumlah kasus Total	Jumlah kasus Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Jumlah kasus Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Jumlah kasus Kelemahan Struktur Pengendalian Intern
Kabupaten Bungo	13	7	3	3

(sumber: IHPS 1 2014 BPK)

Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya dan khususnya untuk kelemahan sistem pengendalian akuntansi, terjadi karena para pejabat atau pelaksana yang bertanggungjawab tidak atau belum melakukan pencatatan secara akurat dan tidak mentaati ketentuan dan prosedur yang ada, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermatnya dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait penetapan atau pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian (sumber: www.bpk.go.id).

Faktor kedua yang juga dapat mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan dari survei awal melalui wawancara didapatkan bahwa faktor pemanfaatan teknologi juga mempunyai peran penting terhadap pelaporan keuangan pemerintah. Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa, pada tahun 2012 APBD Kab. Bungo sebesar Rp. 833 miliar dan meningkat pada tahun 2013 sebesar Rp. 923 miliar (jambi.tribunnews.com). Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto dalam Indriasari, 2007). Untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu kualitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi

(2012) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pada kantor Pemerintah Kabupaten Bungo sampai dengan saat ini masih banyak yang perlu diperhatikan. Hal tersebut disebabkan oleh potensi, baik penyimpangan maupun kesalahan yang disajikan dalam pernyataan laporan keuangan daerah. Terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi. Penelitian lain dilakukan oleh BPK (Nazier, 2009), yang memberikan temuan empiris bahwa 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan oleh : 1) belum ada kebijakan rekrutmen pegawai berlatar belakang akuntansi; 2) walaupun SDM tersebut bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi, akan tetapi mereka dianggap mampu menjalankan/melaksanakan tugas dengan modal diklat dan bimbingan (Nazier, 2009 dalam Insani, 2010).

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Warisno (2009), yang menemukan bukti bahwa tenaga keuangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi pada tingkat SKPD di Provinsi Jambi masih kurang, sehingga belum dapat menerapkan pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Disamping itu, ada indikasi rendahnya kinerja SKPD yang dikarenakan rendahnya kualitas SDM dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan daerah. Apabila kualitas sumber daya manusia di bidang keuangan daerah telah kompeten dan baik, maka pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan aset daerah akan berjalan sesuai dengan rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Ada beberapa penelitian terkait dengan keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Darwanis dan Mahyani (2009) yang menyimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Penelitian ini juga didukung oleh Indrawati dkk (2012) yang menemukan bukti empiris bahwa sistem pengendalian intern, kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai informasi (keandalan dan ketepatan waktu) pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil yang berbeda didapatkan oleh penelitian Anggraeni (2014) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pengawasan keuangan daerah yang berpengaruh terhadap keterandalan sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh. Penelitian terkait keandalan pelaporan keuangan daerah lainnya juga dilakukan oleh Saputra dkk (2012) yang hasil

penelitiannya menyatakan bahwa sumber daya manusia dan pengawasan internal berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Windiyaningrum (2010), perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yakni variabel independen penelitian yang sebelumnya menggunakan dua variabel independen yaitu pengaruh sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah sedangkan penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia yang direplikasi dari penelitian Winda Ekasari (2012) dan Fadilla Husna (2013). Hal ini dikarenakan peneliti melihat fenomena kasus pelaporan keuangan daerah dan kelemahan pengendalian intern akuntansi pemerintah kabupaten Bungo (sumber: IHPS I BPK 2014) dan sedikitnya sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi di instansi pemerintah (Mustafa dkk, 2010). Penelitian ini menggunakan variabel dependen ketepatanwaktuan dan keandalan pelaporan keuangan. Perbedaan terakhir yaitu pada objek penelitian, yang sebelumnya dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah yang berlokasi di Subosukawonosraten, sedangkan objek penelitian ini akan dilakukan di dinas yang ada di Kabupaten Bungo. Hal ini Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 bahwa setiap SKPD diberikan kewenangan untuk mengelola secara mandiri sumber-sumber dana dan kegiatan operasionalnya yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengakuntansian, pelaporan dan pertanggungjawaban daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan meneliti pengaruh pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan judul **"Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Bungo (Studi pada Aparat Pemerintah di Seluruh Dinas Kabupaten Bungo)"**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan di dinas pemerintah Kabupaten Bungo
2. Bagaimanakah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan di dinas pemerintah Kabupaten Bungo
3. Bagaimanakah pengaruh kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan

pelaporan keuangan di dinas pemerintah Kabupaten Bungo

4. Bagaimanakah pengaruh pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan di dinas pemerintah Kabupaten Bungo
5. Bagaimanakah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan di dinas pemerintah Kabupaten Bungo
6. Bagaimanakah pengaruh kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan di dinas pemerintah Kabupaten Bungo.

2. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Pengendalian Intern

Dalam PP No 8 Tahun 2006, Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sedangkan PP No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, Pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Mulyadi (2010) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Mulyadi (2010) menjelaskan tujuan Sistem Pengendalian Internal adalah :

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.1.1. Pengendalian Intern Akuntansi

Pengendalian intern (*internal control*) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Krismiaji, 2010). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang

digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Pertama Pengendalian intern akuntansi terdiri dari rencana organisasi dan prosedur serta catatan (*record*) yang menyangkut pengamanan asset dan reliabilitas catatan keuangan dan karenanya dirancang untuk memberikan jaminan yang layak bahwa:

- a. Transaksi dilakukan sesuai dengan otorisasi manajemen secara umum atau khusus.
- b. Catatan dicatat sesuai dengan kebutuhan (1) untuk memungkinkan penyusunan ikhtisar keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum (*generally accepted accounting principles*, atau GAAP) atau kriteria lain yang berlaku untuk ikhtisar seperti itu dan (2) untuk menjaga akuntabilitas asset.
- c. Akses ke asset hanya dibolehkan sesuai dengan otorisasi manajemen.
- d. Akuntabilitas tercatat untuk asset dibandingkan dengan asset yang ada secara berkala dengan selang waktu yang layak dan tindakan yang semestinya diambil bila ada selisih diantara keduanya.

Kedua pengendalian intern administratif meliputi, tetapi tidak terbatas pada rencana organisasi dan prosedur serta catatan yang menyangkut proses-proses keputusan yang menghasilkan organisasi manajemen untuk transaksi. Otorisasi demikian merupakan fungsi manajemen yang langsung terkait dengan tanggung jawab untuk mencapai sasaran organisasi dan merupakan titik tolak untuk menyelenggarakan pengendalian akuntansi atas transaksi.

Tujuan utama pengendalian internal, *The American institute of certified public accountants*, menjelaskan tentang hal:

Pertama Melindungi asset perusahaan (yaitu, sumberdaya termasuk data dan informasi). Kedua Memastikan ketepatan dan keandalan data dan informasi akuntansi (artinya, menjaga agar data dan informasi bebas dari kesalahan dan menyediakan hasil yang konsisten bila memproses data yang serupa). Ketiga Mendorong efisiensi di semua operasi perusahaan. Keempat Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen.

Tujuan pertama dan kedua merupakan tujuan pengendalian intern akuntansi sementara tujuan yang ketiga dan keempat merupakan tujuan pengendalian intern administratif. Pengendalian intern akuntansi merupakan sebuah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan perusahaan yang tercermin dalam keandalan laporan keuangan, efisien dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan, serta dipenuhinya standar yang ditetapkan.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, juga segala kesatuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh daerah serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku (Mamesa, 1995) dalam (Halim, 2007). Menurut PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 1 ayat 5, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, dengan menggunakan konsep nilai uang (*value for money*) serta prinsip tata pemerintahan yang baik (*good government governance*). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (PP No. 58 Tahun 2005, pasal 1).

2.2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software, database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, dalam Indriasari, 2008). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware dan software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan. Peningkatan nilai informasi tersebut bisa kita amati dari hal sebagai hubungan antara nilai Informasi, Biaya, dan Waktu pengolahan data menjadi informasi. Untuk pemrosesan data manual biasanya berlaku bahwa semakin cepat waktu yang diinginkan untuk pemrosesan, maka biaya yang dibutuhkan akan semakin besar. Dengan bantuan komputer pengolahan data bisa diatur sedemikian rupa sehingga informasi dapat disajikan tepat waktu dan dengan biaya yang masih dibawah manfaat itu sendiri. Dengan kata lain,

kita bisa mengatur pengolahan data sehingga manfaat ekonomis sebuah informasi dapat diperoleh secara maksimal (Hanafi, 2013). Pernyataan itu didukung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

2.3. Kualitas sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia menurut Rucky (2003) adalah Tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kemauan yang dapat ditunjukkan oleh sumber daya manusia. Tingkat itu dibandingkan dengan tingkat yang dibutuhkan dari waktu ke waktu oleh organisasi yang memiliki sumber daya manusia tersebut. Kualitas sumberdaya manusia adalah kemampuan sumberdaya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo, 2001 dalam Arfianti, 2011).

Menurut Wahyono (2004) dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai, menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan serta sumberdaya yang menghasilkannya. Laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tersebut benar atau valid. Sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem tersebut dituntut untuk memiliki kemampuan atau keahlian akuntansi yang memadai yang dapat dicapai dengan adanya kemauan untuk belajar dan mengasah kemampuannya dibidang akuntansi. Disini, kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang andal. Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik dan sesuai bidangnya sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002).

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

2.4. Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Akuntansi keuangan sektor publik terkait dengan tujuan dihasilkannya laporan keuangan eksternal. Tujuan penyajian laporan keuangan adalah memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan, yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan tersebut dan menilai bagaimana kinerja entitas pelaporan itu selama satu periode pelaporan. Penyusunan laporan keuangan sektor publik berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

2.4.1 Peranan Pelaporan Keuangan

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan antargenerasi (*Intergenerational equity*)
5. Evaluasi Kinerja

2.4.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah (PP No. 71, 2010) antara lain:

- a) Relevan, yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
- b) Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan

kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

- c) Dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- d) Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.4.3 Keandalan Pelaporan Keuangan

Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas andal adalah apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Keandalan merupakan kualitas informasi yang disampaikan laporan keuangan menyebabkan pemakai informasi akuntansi sangat tergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. Keandalan suatu informasi sangat tergantung pada kemampuan suatu informasi untuk menggambarkan secara wajar peristiwa yang digambarkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Informasi mungkin relevan tetapi hakekat penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik menurut PP No. 71 Tahun 2010 sebagai berikut:

- a. Penyajian jujur
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)
- c. Netralitas

2.4.4 Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP 71 Tahun 2010 ketepatan waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi, tapi relevansi informasi tidak dimungkinkan tanpa ketepatan waktu informasi mengenai kondisi dan proses perusahaan harus cepat dan tepat sampai kepada pengguna laporan keuangan.

Ketepatan waktu menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang akan mempengaruhi prediksi dan

keputusan pemakai. Ketepatan waktu juga menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Informasi yang tepat waktu dipengaruhi oleh manajer dalam merespon setiap kejadian atau permasalahan. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan hilangnya nilai dan manfaat keputusan. Informasi yang tepat waktu akan mendukung manajer menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam lingkungan kerja mereka (Respati, 2001)

Sebagai aspek pendukung keberpautan, keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Ketepatan waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Jika terjadi penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi yang andal. Penyediaan informasi yang tepat waktu akan meningkatkan keandalan informasi.

Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Karena itu, terpenuhinya kriteria relevan (tepat waktu) dan keandalan menjadi kebutuhan utama bagi pengambil keputusan, (Sebastian, 2010).

2.5. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dengan demikian, hipotesis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- H₁ : Pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah.
- H₂ : Pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah.
- H₃ : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah.
- H₄ : Pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah.
- H₅ : Pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah.
- H₆ : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2012) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi pada penelitian ini adalah kepala dan staf sub bagian (kasubag) keuangan di dinas Kabupaten Bungo

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012). Hal ini dilakukan bila jumlah populasi yang relatif kecil atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Responden dalam penelitian ini yaitu kepala dan staf sub bagian keuangan di dinas Kabupaten Bungo, maka jumlah responden dalam penelitian ini adalah 78 orang. Alasan pemilihan responden adalah dikarenakan kasubag dan staf keuangan bertanggungjawab dalam pembuatan laporan keuangan pada masing-masing dinas dan bagian-bagian tersebut merupakan elemen penting dalam menghasilkan laporan keuangan di instansi pemerintah, karena terlibat langsung dalam pembuatan laporan keuangan dan sangat memahami kegiatan akuntansi di lingkungan kerjanya.

3.2. Variabel Penelitian

Operasional variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Menurut Sugiyono (2012) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

1. Pengendalian intern akuntansi

Pengendalian internal akuntansi adalah bagian dari pengendalian intern yang meliputi rencana dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Krisniasji, 2010).

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi (jurnali dan Supomo (2002)

3. Kualitas sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumberdaya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. (widodo, 2001 dalam afrianti,2011)

4. Keandalan Pelaporan Keuangan pemerintah

Keandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid (PP No. 71 Tahun 2010).

5. Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah

Tersedianya informasi dengan tepat waktu membuat informasi tersebut dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan (PP No.71 Tahun 2010)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Evaluasi *Outer Model* atau Model Pengukuran

1) *Composite Reliability Block Indicator*

Composite Reliability Block Indicator diukur dengan dua kriteria yaitu *composite reliability* dan *cronbach alpha* dari blok indikator yang mengukur konstruk tersebut. Suatu konstruk dinyatakan reliabel, jika nilai *composite reliability* lebih dari 0,70 (Ghozali & Latan, 2015).

Hasil evaluasi *composite reliability block indicator* Model Pertama dengan menggunakan *composite reliability* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3

Hasil Evaluasi *Composite Reliability* Model Pertama

Variabel Laten	<i>Composite Reliability</i>	<i>P-Value</i>
Keandalan	0,868	0,000
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,837	0,000
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,797	0,000
Pengendalian Intern Akuntansi	0,789	0,000

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa nilai semua konstruk di atas 0,70 yang berarti bahwa konstruk dalam penelitian ini memiliki realibilitas yang baik.

Hasil evaluasi *composite reliability block indicator* Model Kedua dengan menggunakan *composite reliability* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4

Hasil Evaluasi *Composite Reliability* Model Kedua

Variabel Laten	<i>Composite Reliability</i>	<i>P-Value</i>
Ketepatanwaktuan	0,933	0,000
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,800	0,000
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,729	0,000
Pengendalian Intern Akuntansi	0,784	0,000

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa nilai semua konstruk di atas 0,70 yang berarti bahwa konstruk dalam penelitian ini memiliki realibilitas yang baik.

4.1.2 Hasil Evaluasi Inner Model atau Model Struktural

Inner model atau model struktural diukur dengan 2 (dua) kriteria yaitu:

1) R-Square

Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-Square yang merupakan uji goodness of fit model (Ghozali & Latan, 2015). Hasil evaluasi R-Square untuk Model Pertama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
R-Square Model Pertama

Variabel Laten	R-Square Adjusted
Keandalan	0,312

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa variabilitas konstruk keandalan dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia sebesar 31,2%, sedangkan sisanya sebesar 68,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Hasil evaluasi R-Square untuk Model Kedua dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6
R-Square Model Kedua

Variabel Laten	R-Square Adjusted
Ketepatanwaktuan	0,374

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa variabilitas konstruk ketepatanwaktuan dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia sebesar 37,4%, sedangkan sisanya sebesar 62,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

2) Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji pengaruh pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan serta pengaruh pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatanwaktuan dengan tingkat signifikansi sebesar 5%.

Tabel 1.7
Hasil Uji Hipotesis Model Pertama

Pengaruh	Original Sample	Sample Mean	Standard Error	T-Stat	P-Value
Pengendalian Intern Akuntansi → Keandalan	0,289	0,330	0,122	2,374	0,018
Pemanfaatan Teknologi Informasi → Keandalan	0,291	0,292	0,121	2,399	0,017
Kualitas Sumber Daya Manusia → Keandalan	0,170	0,183	0,144	1,185	0,237

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 1.7 menunjukkan bahwa pengujian pengendalian intern akuntansi terhadap keandalan menghasilkan koefisien sebesar 0,289 dan p-value sebesar 0,018. Oleh karena p-value lebih kecil daripada 0,05 maka H₁ diterima yang berarti bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keandalan.

Pengujian pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan menghasilkan koefisien sebesar 0,291 dan p-value sebesar 0,017. Oleh karena p-value lebih kecil daripada 0,05 maka H₂ diterima yang berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan.

Pengujian kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan menghasilkan koefisien sebesar 0,170 dan p-value sebesar 0,237. Oleh karena p-value lebih besar daripada 0,05 maka H₃ ditolak yang berarti bahwa kualitas sumber daya tidak berpengaruh terhadap keandalan.

Berikut ini hasil uji hipotesis mengenai pengaruh pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatanwaktuan:

Tabel 1.8
Hasil Uji Hipotesis Model Kedua

Pengaruh	Original Sample	Sample Mean	Standard Error	T-Stat	P-Value
Pengendalian Intern Akuntansi → Ketepatanwaktuan	0,493	0,463	0,120	4,116	0,000
Pemanfaatan Teknologi Informasi → Ketepatanwaktuan	0,012	0,092	0,143	0,085	0,933
Kualitas Sumber Daya Manusia → Ketepatanwaktuan	0,242	0,248	0,117	2,059	0,040

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 1.8 menunjukkan bahwa pengujian pengendalian intern akuntansi terhadap ketepatanwaktuan menghasilkan koefisien sebesar 0,493 dan p-value sebesar 0,000. Oleh karena p-value lebih kecil daripada 0,05 maka H₄ diterima yang berarti bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan.

Pengujian pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan menghasilkan koefisien sebesar 0,012 dan p-value sebesar 0,933. Oleh karena p-value

lebih besar daripada 0,05 maka H_5 ditolak yang berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan.

Pengujian kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatanwaktuan menghasilkan koefisien sebesar 0,242 dan p -value sebesar 0,040. Oleh karena p -value lebih kecil daripada 0,05 maka H_6 diterima yang berarti bahwa kualitas sumber daya berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pengendalian Intern akuntansi terhadap keandalan pelaporan keuangan

Berpengaruhnya pengendalian intern akuntansi terhadap keandalan pelaporan keuangan di dinas Kabupaten Bungo disebabkan karena setiap dinas selalu berupaya untuk menerapkan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya pengawasan secara teratur yang dilakukan oleh pimpinan maupun instansi terkait seperti Inspektorat, Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, sering diadakannya sosialisasi atau pelatihan tentang peraturan perundang-undangan terbaru dan pelaporan keuangan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat membantu aparatur sipil negara untuk selalu bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menambah wawasan di bidang keuangan.

4.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan

Berpengaruhnya pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan pelaporan keuangan di dinas kabupaten bungo disebabkan karena setiap dinas telah menggunakan sistem komputerisasi dan mempunyai aplikasi akuntansi (bernama SIMDA: Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) yang terletak di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah sehingga memudahkan dalam pemrosesan administrasi keuangan dan lebih akurat.

4.2.3 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan

Hasil penelitian ini mendapatkan tidak berpengaruhnya kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan di dinas kabupaten bungo disebabkan karena minimnya staff atau pegawai yang berlatar belakang akuntansi bahkan masih adanya yang berlatar pendidikan SMA. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei sebesar 15.62% yang berlatar pendidikan SMA dan hasil wawancara didapatkan bahwa rata-rata pegawai sarjana dibidang keuangan bukan berlatar belakang akuntansi atau ekonomi. sehingga membutuhkan waktu untuk pemahaman atau pembelajaran lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2012) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan

keuangan pada kantor Pemerintah Kabupaten Bungo sampai dengan saat ini masih banyak yang perlu diperhatikan. Hal tersebut disebabkan oleh potensi, baik penyimpangan maupun kesalahan yang disajikan dalam pernyataan laporan keuangan daerah. Terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi.

4.2.4 Pengaruh Pengendalian Intern akuntansi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan

Berpengaruhnya pengendalian intern akuntansi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan di dinas kabupaten Bungo disebabkan karena bidang keuangan mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik serta (struktur organisasi) bidang keuangan yang langsung di bawah arahan kepala dinas atau sekretaris dinas yang memudahkan otorisasi sehingga mampu mempersingkat waktu dalam pengambilan keputusan.

4.2.5 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

Hasil penelitian ini mendapatkan tidak berpengaruhnya pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan di dinas kabupaten bungo disebabkan pertama karena sistem komputerisasi yang digunakan telah berumur dan sering terjadinya *error* serta lambatnya tindakan yang diambil sehingga menghambat pekerjaan. Kedua berdasarkan wawancara ke beberapa bendahara gaji dan staf keuangan didapatkan bahwa dengan tidak adanya staf yang berlatar belakang IT atau komputer membuat tidak adanya perawatan komputer secara berkala baik *hardware* maupun *software* serta jaranganya *back up* data dilakukan sehingga rentan untuk diserang virus hingga hilangnya data. Ketiga, Teknologi informasi atau komputer saat ini berkembang pesat cenderung adanya inovasi setiap tahunnya namun hal tersebut tidak sebanding akan kemampuan penggunanya (*Brainware*) sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi jika ada perubahan sistem. Hal ini tentu mempengaruhi ketepatanwaktuan bekerja termasuk dalam pelaporan keuangan.

4.2.6 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

Berpengaruhnya kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan di dinas kabupaten bungo disebabkan karena banyaknya staf atau pegawai yang ditempatkan dibidang keuangan terutama untuk staf yang berstatus honorer. Untuk di Kabupaten Bungo sendiri lebih kurang memiliki pegawai dengan jumlah 10 ribu yang didalamnya terdapat 4 ribu lebih pegawai berstatus honorer/tenaga

kontrak (www.infobungo.com). Sehingga suatu pekerjaan dapat dikerjakan secara cepat.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan, ini berarti bahwa setiap bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik, yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang andal .
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan, ini berarti bahwa setiap pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian laporan keuangan yang andal pada pemerintah daerah Kabupaten Bungo.
3. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan, ini berarti bahwa dengan tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan bidangnya, maka pegawai tidak bisa lebih cepat memahami apa yang harus dikerjakan sehingga memberikan kontribusi negatif terhadap pencapaian laporan keuangan yang andal pada pemerintah daerah Kabupaten Bungo.
4. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan, ini berarti bahwa setiap bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik, yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang tepatwaktu .
5. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan, ini berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan kontribusi positif namun masih ada mengalami kendala baik itu peralatan maupun dalam cara penggunaannya sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian laporan keuangan yang tepatwaktu pada pemerintah daerah Kabupaten Bungo.
6. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan, ini berarti bahwa kualitas SDM yang baik dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya maka ia akan menyelesaikan pekerjaan/tugasnya dengan baik dan lebih cepat pada pemerintah daerah Kabupaten Bungo.

5.2. Saran

1. Penelitian selanjutnya hendaknya lebih memperluas obyek penelitian, tidak terbatas pada dinas-dinas di Kabupaten Bungo saja, tetapi dapat dilakukan pada badan atau lembaga pemerintahan

yang ada didaerah tersebut sehingga dapat cakupan wilayah yang lebih luas.

2. Peneliti selanjutnya dapat mendampingi responden secara langsung pada saat pengisian kuisisioner. Sehingga responden dapat menanyakan secara langsung kepada peneliti terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kurang dimengerti responden.
3. Bagi dinas pemerintah Kabupaten Bungo diharapkan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama bidang akuntansi dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, sehingga diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan tepat waktu. Agar Kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dapat terlaksana dengan efektif, sebaiknya pemerintah kabupaten bungo dapat memulai dengan membuka penerimaan pegawai belatar belakang akuntansi atau memfasilitasi pegawai untuk menempuh pendidikan dibidang akuntansi serta menerima pegawai khusus bidang teknologi informasi dan peralatan yang usang/rusak di data secepat mungkin. Sehingga kegiatan pembuatan laporan keuangan tidak terganggu oleh peralatan yang rusak tersebut. Maka laporan keuangan dapat dihasilkan andal dan tepatwaktu.

5.3. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada Dinas dalam satu Kabupaten. Sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih jelas maupun digeneralisir kesemua objek mengenai keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pada penelitian ini jumlah kuisisioner yang dapat digunakan hanya 82,05 % dari keseluruhan kuisisioner yang disebar (100%). Hal ini disebabkan banyaknya responden yang tidak terlalu peduli terhadap pengisian kuisisioner karena kesibukan dan keterbatasan waktu yang mereka miliki. Sehingga beberapa kuisisioner ada yang hilang bahkan tidak diisi.
3. Peneliti tidak mendampingi responden secara langsung pada saat pengisian kuisisioner karena keterbatasan waktu. Sehingga responden tidak bisa menanyakan langsung terhadap pertanyaan yang tidak dimengerti.

DAFTAR REFERENSI

- Arfianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang)*. Jurnal Universitas Diponegoro, Semarang.
- Armando, Gerry. 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di kota Bukittinggi)*. Artikel Ilmiah Universitas Negeri Padang, Padang.
- Anggraeni, Dian Tri dan Riduwan, Akhmad. 2014. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Riset dan Ilmu akuntansi Vol.3. STIESIA Surabaya
- Baridwan, Zaki. 2008. *Intermediate Accounting*. BPFE: Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2013. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2013*, (Online), (www.bpk.go.id, diakses 16 Desember 2013).
- Darwanis dan Desi Dwi Mahyani. 2009. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol.2 No.2 Juli, Aceh, Hal. 133-151.
- Ekasari, Winda. 2012. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (Survei pada SKPD Kabupaten Kampar)*.
- Fauzi, Eko Saputra, Desmiyawati dan Nurazlina. 2012. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Internal Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada SKPD Pemerintah Provinsi Riau)*.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, Edisi 5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. AMP YKPN: Yogyakarta.
- Halim, Restianto dan Karman, 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Hanafi, Rustam. 2013. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis UNISSULLA Semarang.
- Eliza, 2015. Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jambi .Melalui [Http://:bungokab.go.id](http://bungokab.go.id) (diakses pada 22 November 2015).
- Husna, Fadhillah. 2013. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang)*. Artikel Ilmiah Universitas Negeri Padang, Padang.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*. SNA Ke XI, Pontianak.
- Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. AMP YKPN: Yogyakarta.
- Leonard, Febriady Sembiring. 2013. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang)*. Artikel Ilmiah Universitas Negeri Padang, Padang.
- Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah :Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, Politik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Andi: Yogyakarta.
- Mustafa, Santiadji, Sutrisno, dan Rosidi. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keterandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari*. Jurnal Akuntansi.
- Nur Azmi, 2016. *BPK: Pemkab Bungo Wajib pangkas tenaga honorer*. Melalui <http://www.infobungo.com/2016/04/bpk.html> (diakses 23 Oktober 2017)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang *Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Pratiwi, Widya, 2012. *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern*. Jurnal Ekonomi STIE Hajo Agus Salim. Bukittinggi.

Rahayu, Sri dan Misni Erwati. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Modul Ajar Akuntansi Universitas Jambi. Jambi

Riduwan. 2010, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Alfabeta: Bandung.

Rianse, Usman dan Abdi. 2012. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Alfabeta: Bandung

Saputra, Eko.F, dkk. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Internal Terhadap Keterandalan Pelaporan Pemerintah Daerah (Studi Pada pemerintah Provinsi Riau*. Artikel Ilmiah. 2011

Siregar, Baldric, 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*UPP STIM YKPN: Yogyakarta

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.Alfabeta: Bandung.

Suliyanto. 2011. *Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta.Andi.

Tuasikal, Askam. 2008. *Pengaruh pengawasan, pemahaman system akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku)*. Finance and Banking Journal Vol. 10 No. 1 Juni 2008

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Winidyaningrum, dan Rahmawati, 2010. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII.

W, Joseph Wilkinson. 1993. *Sistem Akuntansi dan Informasi*. Binarupa Aksara : Jakarta.

Yuliartha. 2013. *Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian*

Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang. Artikel Ilmiah Universitas Negeri Padang, Padang

